



**Urgensi Pengelolaan Kawasan Pesisir dalam Perspektif Waterfront City:
Kajian Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Terhadap
Pengembangan Pesisir Kamal**

Mohammad Afifuddin¹, Bangun Sentosa D.H²
Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Sejauh ini pembangunan kawasan pesisir di Madura belum optimal. Padahal Madura adalah pulau dengan garis pantai yang cukup panjang. Kehadiran Jembatan Suramadu awalnya diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan kawasan pesisir Madura. Setelah sepuluh tahun lebih, berdirinya Jembatan Suramadu tidak berkorelasi positif dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi warga Madura, terutama warga di sekitar jembatan, yakni warga Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan studi Muhsoni, dkk (2021), pasca pembangunan Suramadu tingkat perekonomian warga Kamal malah menurun 98 persen. Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian kebijakan mengenai perencanaan pembangunan Kawasan pesisir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Terutama dalam konteks implementasi konsep *waterfront city* dalam penataan kawasan pesisir Kamal, Bangkalan. Temuan dari penelitian ini adalah fakta empiris bahwa konsep pembangunan kawasan pesisir di Kecamatan Kamal berdasarkan perspektif *waterfront city* belum tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD atau APBD) Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut menunjukkan belum adanya *political will* dari Pemkab Bangkalan untuk membangun Kawasan Pesisir Kamal sesuai dengan konsep *waterfront city*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan, yaitu: *analytical approach*, dan *case approach* dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dikombinasikan dengan *empirical research* (penelitian lapangan) dengan metode pengumpulan data melalui observasi, *depth interview* serta *focus group discussion* (FGD).

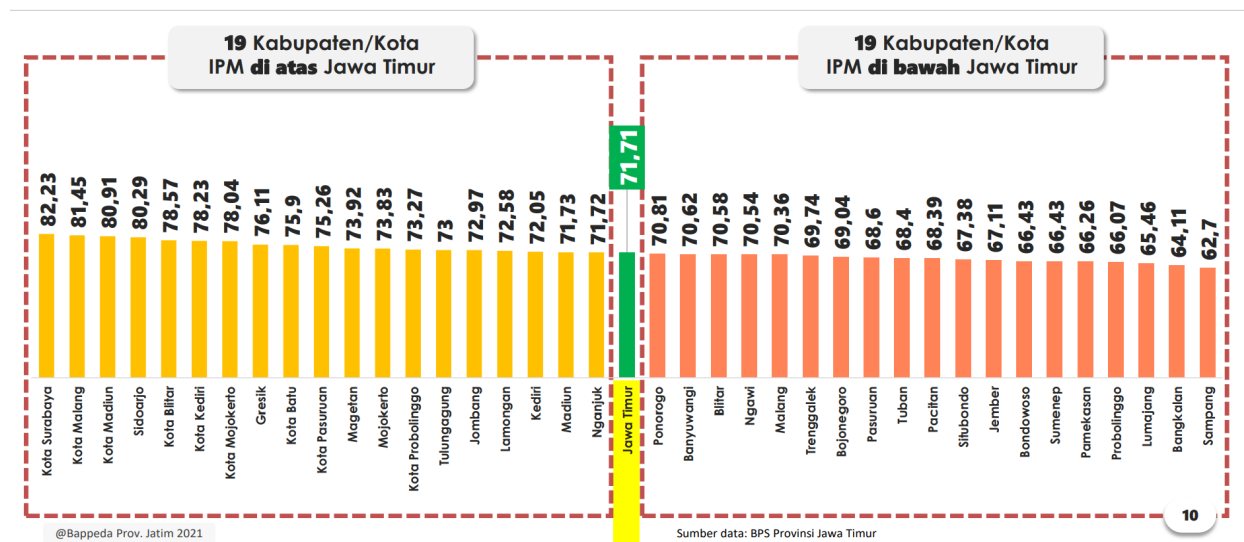
Kata Kunci: *Politik Kebijakan, Kawasan Pesisir, Waterfront City*

¹ m.afifuddin@trunojoyo.ac.id

Pendahuluan

Beberapa indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah di Madura menunjukkan pertumbuhan yang tidak menggembirakan. Misalnya, angka indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka kemiskinan tahun 2020 di empat kabupaten di Madura capaiannya lebih buruk dibanding rerata capaian Provinsi Jawa Timur. Bahkan posisi Kabupaten Sampang dan Bangkalan berada di urutan paling buncit se-Jawa Timur.

Gambar 1. IPM Kab/Kota se -Jawa Timur Tahun 2020

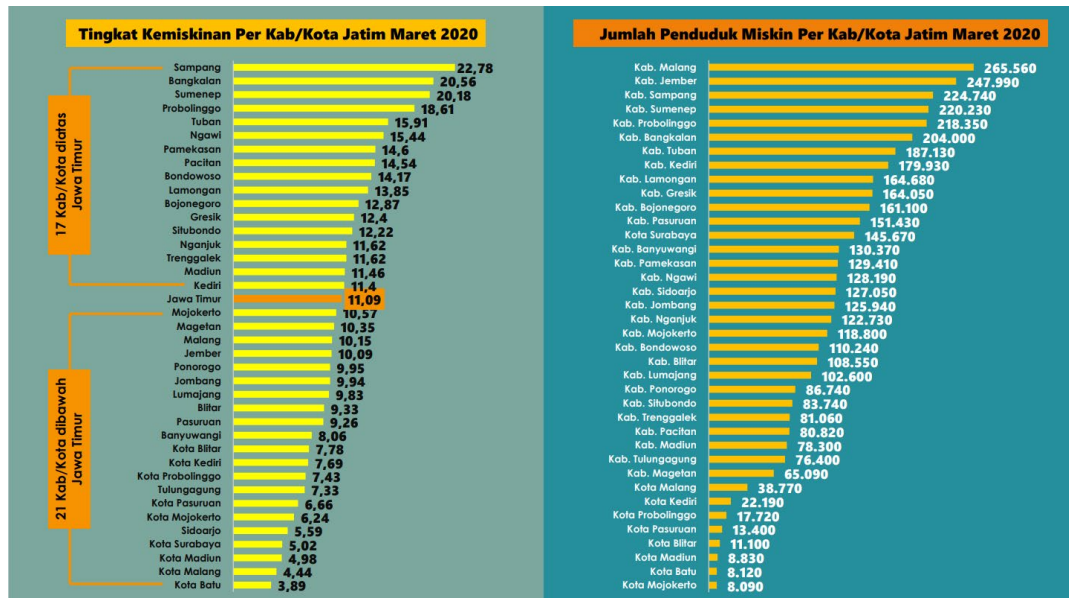


Sumber: Bappeda Prov. Jawa Timur (2021)

Dalam rumusan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPM merupakan indeks komposit yang tersusun atas beberapa aspek, yakni kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli masyarakat (standar hidup layak). Dari ketiga komponen tersebut, keempat Kabupaten di Madura menempati posisi 6 terbawah se-Jawa Timur (sebagaimana tergambar dalam tabel di atas).

Selain IPM, angka kemiskinan di Madura juga tergolong tinggi dibandingkan dengan rerata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Sumenep menempati urutan tiga besar kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Sedangkan Pamekasan menduduki peringkat ketujuh sebagai Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur (sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini).

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Per Kab/Kota se-Jawa Timur Tahun 2020



Sumber: Bappeda Prov. Jawa Timur 2021

Hal tersebut terjadi, salah satunya, disebabkan belum optimalnya pembangunan kawasan pesisir di Madura. Korelasi tersebut relevan mengingat Madura adalah pulau dengan garis pantai yang cukup panjang. Kehadiran Jembatan Suramadu awalnya diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Madura. Tapi ternyata setelah sepuluh tahun lebih, berdirinya Jembatan Suramadu tidak berkorelasi positif dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi warga Madura, terutama warga di sekitar jembatan, yakni warga Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan studi Muhsoni, dkk (2021), pasca pembangunan Suramadu tingkat perekonomian warga Kamal malah menurun 98 persen. Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian kebijakan mengenai perencanaan pembangunan Kawasan pesisir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Terutama dalam konteks implementasi konsep *waterfront city* dalam penataan kawasan pesisir Kamal, Bangkalan. Temuan yang ditargetkan dari penelitian ini adalah data dan fakta empiris apakah konsep pembangunan kawasan pesisir di Kecamatan Kamal berdasarkan perspektif *waterfront city* sudah tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD atau APBD) Kabupaten Bangkalan. Apabila sudah tertuang, akan dilakukan studi implementasi kebijakan terkait perencanaan tersebut. Sejauh mana implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan konsep *waterfront city*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan, yaitu: *analytical approach*, dan *case approach* dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dikombinasikan dengan *empirical research* (penelitian lapangan) dengan metode pengumpulan data melalui observasi, *depth interview* serta *focus group discussion* (FGD). Sedangkan data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini sangat penting dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perencanaan kawasan pesisir Kamal untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini ditargetkan berkontribusi dalam pengembangan kajian Sosiologi Politik, Sosiologi Pembangunan dan Sosiologi Perkotaan yang merupakan klaster-kluster penting dalam kajian bidang ilmu Sosiologi. Hasil riset ini akan memperbarui dan memperkaya bahan referensi kajian sosiologi di masa otonomi daerah dan pengarusutamaan pembangunan kawasan pesisir perkotaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka paper ini bertujuan untuk menjawab rumusan pertanyaan berikut ini: (1) Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyusun perencanaan pembangunan kawasan pesisir di Kecamatan Kamal?; (2) Bagaimana implementasi konsep waterfront city dalam perencanaan kawasan pesisir di Kecamatan Kamal Kab. Bangkalan?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: (a) Menganalisis dokumen perencanaan Pemkab Bangkalan terkait dengan pembangunan kawasan pesisir di Kec. Kamal; (b) Mengkaji implementasi perencanaan pembangunan kawasan pesisir di Kecamatan Kamal Kab. Bangkalan.

Urgensi penelitian ini ingin melihat sejauh mana keseriusan Pemkab Bangkalan dalam mengembangkan kawasan pesisir Kamal menurut perspektif *waterfront city*. Indikatornya dapat dilihat dari sejauh mana *political will* terhadap pengembangan Kawasan pesisir tersebut dituangkan Pemkab Bangkalan di dokumen perencanaan yang mereka susun. Dokumen perencanaan kabupaten dalam bentuk RPJMD/RKPD/APBD merupakan induk perencanaan yang disusun pemerintah daerah untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu harus dikaji apakah dokumen perencanaan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak dalam rangka peningkatan ekonomi warga di sekitar kawasan pesisir. Maka, penelitian ini sangat penting karena memiliki urgensi yang meliputi: (a) Memberikan manfaat berupa kajian evaluatif yang komprehensif mengenai implementasi pembangunan kawasan pesisir Kab. Bangkalan; (b) Memberikan masukan tentang rumusan kebijakan

mengenai model implementasi kebijakan pembangunan kawasan pesisir berdasarkan perspektif *waterfront city*.

Penelitian ini ditargetkan berkontribusi dalam pengembangan kajian Sosiologi Politik, Sosiologi Pembangunan dan Sosiologi Perkotaan yang merupakan klaster-kluster penting dalam kajian bidang ilmu Sosiologi. Hasil riset ini akan memperbarui dan memperkaya bahan referensi kajian sosiologi di masa otonomi daerah dan pengarusutamaan pembangunan Kawasan pesisir perkotaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendekati data dengan melihat pengalaman dalam rangka memahami perilaku sosial. Dengan melihat pengalaman tersebut maka peneliti mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Model analisa dapat menjelaskan keadaan dan kondisi yang berlangsung serta gejala penting yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya pada aspek yang diteliti (Salim, 2001). Pengumpulan data dilakukan melalui proses kajian kepustakaan, observasi, *depth interview* dan *focus group discussion* (FGD).

Lokasi Penelitian di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang berada di Pulau Madura. Pada penelitian ini, data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan; penelitian lapangan berupa observasi dengan para pihak dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders*.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Melalui analisis deskriptif peneliti memberikan gambaran atau paparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan memperlakukan obyek berdasarkan kategori tertentu, kategori tersebut bertujuan untuk menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian diklasifikasikan secara yuridis dan sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian, yaitu: (1) bahan atau fakta disistematisasi atau ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti; (2) Bahan atau fakta yang telah disistematisasi, kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori; (3) Bahan yang telah diuraikan kemudian dievaluasi. Pada tahap ini dilakukan beberapa aktivitas seperti mengumpulkan dan mengkaji data-data sekunder serta pemetaan hasil *depth interview* dengan narasumber dan hasil *focus group discussion* (FGD) dengan *stakeholders*. (4) Langkah tersebut dilakukan untuk memahami fokus penelitian secara

mendalam dan komprehensif serta menyusunnya dalam laporan hasil penelitian secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Studi Terdahulu dan Konstruksi Teoritik

Cukup banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan isu ini. Diantaranya adalah beberapa penelitian berikut ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Ishartono dan Santoso Tri Rahardjo pada tahun 2016 dengan judul *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di Kawasan pesisir Tuban yang diterbitkan di Jurnal Social Work Journal*. Volume 6 No. 2 Tahun 2016. Dalam riset tersebut peneliti menyatakan bahwa isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani dan Irma Juraida (2019) dengan judul *Eksistensi Perempuan Suku Sasak dalam Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Ekowisata Laut Desa Sembalun Lawang yang diterbitkan di Jurnal Community*. Volume 5, No. 2 Oktober 2019. Dalam penelitian tersebut kedua peneliti meneliti tentang keterlibatan perempuan desa dalam pengembangan desa wisata berbasis ekosistem laut dengan konsep ekowisata untuk mendukung realisasi target SDGs, yakni mengakhiri kemiskinan melalui pengembangan sektor pariwisata dan juga menciptakan kesetaraan gender.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Roberta Zulfhi Surya dengan judul *Analisa Keselarasan SDGs Dengan Program Pembangunan Kawasan Pesisir Sungai di Desa Seresam Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan di Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2019. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa Bappenas RI meluncurkan program *Voluntary National Report (VNR)* untuk percepatan pencapaian SDGs.

Untuk merespon itu, Sekretariat SDGs Provinsi Riau melakukan survey best practices SDGs ke 12 Kabupaten/Kota dengan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan desk review. Survey dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi sementara desk review untuk melakukan analisa keselarasan antara SDGs dengan program pembangunan Kawasan waterfront city.

Namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengambil fokus studi tentang penerapan waterfront city di Kawasan pesisir di Madura. Maka dari itu, sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian dengan tema ini adalah yang pertama kali dilakukan.

Koentjaraningrat (1994) menjabarkan definisi masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Adapun secara umum syarat-syarat terbentuknya masyarakat terdiri dari kriteria berikut ini; (a) Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama; (b) Merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya.

Sementara itu secara umum masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup dan menetap di kawasan pesisir dan laut. Salah satu karakteristik masyarakat pesisir adalah ketergantungan yang kuat terhadap lingkungan pesisir. Baik dan buruknya lingkungan akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Untuk lebih jelasnya mengenai definisi tersebut dapat kita simak rangkuman beberapa pandangan dari para ahli sebagaimana yang dikemukakan kembali oleh (Wisadirana, 2005) berikut ini. Menurut Siti Aminah (2000) masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup di tepi pantai dekat dengan laut, seperti masyarakat di tepi Pulau Jawa, Sumatra, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Soetandyo Wignyosoebroto (2005) masyarakat pesisir atau dikenal dengan bahasa asing Coastal Community, ialah suatu masyarakat yang memiliki ciri utama yang tidak memproduksi barang dan jasa secara ekonomi. Kemudian menurut Dahuri (2002) masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di tepi laut dan menggantungkan kehidupannya dari ekosistem laut.

Konsepsi Waterfront City Development berawal dari kebangkrutan kota bandar di Amerika Serikat Tahun 1970-an akibat resesi ekonomi. Salah satu kota bandar yang mengalami kebangkrutan adalah Baltimore. Beruntungnya, negeri Paman Sam mempunyai seorang urban visioner dalam diri James Rouse. Melalui pendekatan pembangunan dalam pengelolaan kota bandar, Rouse mampu menyelamatkan Baltimore dari keterpurukan ekonomi. Pendekatan

Rouse dalam membangkitkan Baltimore menjadi salah satu fase penting dalam pembangunan kota, sekaligus menjadi salah satu cetak biru perencanaan pembangunan di beberapa kota bandar, baik di Amerika Serikat maupun dunia. Peristiwa ini merupakan awal mula kelahiran penataan ulang kawasan bandar lama yang disebarluaskan media massa sebagai pembangunan waterfront city (Yuwono, 2009: 2).

Waterfront city development dapat dioperasionalkan jika memenuhi prasyarat dan pertimbangan tertentu. Prabudiantoro (1997) menjelaskan 5 kriteria umum perancangan waterfront city development di kawasan perkotaan, antara lain : (1) Berlokasi di tepi suatu wilayah perairan yang besar (sungai, danau, laut, dan sebagainya), (2) Biasanya merupakan area pelabuhan, perdagangan, permukiman, dan pariwisata, (3) Mempunyai fungsi utama sebagai tempat rekreasi permukiman, industri, dan pelabuhan, (4) Pemandangan berorientasi ke arah perairan, dan (5) Pembangunannya dilakukan ke arah vertikal horisontal. Sedangkan Breen (1996) membagi konsep waterfront city development ke dalam 4 tipologi utama berdasarkan sifat dan jenis aktifitasnya, yakni: mixed-used waterfront, recreational waterfront, residential waterfront, working waterfront. Dalam mixed-used waterfront, kawasan tepian air difungsikan untuk menampung aktifitas-aktifitas yang berbeda karakter ke dalam sebuah kawasan kota yang terintegrasi, semisal permukiman, perkantoran, perniagaan, tempat kebudayaan, dan sebagainya; sedangkan dalam recreational waterfront, kawasan tepian air difungsikan untuk aktifitas rekreasi masyarakat. Adapun residential waterfront, kawasan tepian air difungsikan sebagai permukiman, sedangkan dalam working waterfront, kawasan tepian air difungsikan untuk aktifitas pekerjaan masyarakat setempat.

Kebijakan Pemkab Bangkalan Terkait Pengembangan Kawasan Pesisir Kamal

Implementasi adalah tahap tindakan/aksi dimana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi kebijakan yang dioperasionalkan (Denhart, 1995). Selanjutnya dalam memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang selanjutnya terjadi sesudah suatu program dilaksanakan atau dirumuskan.

Selanjutnya ada beberapa pendapat pakar yang memberikan pendapatnya tentang proses implementasi seperti: Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Maindoka, 2004), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang berhubungan dengan usaha untuk

pengadministrasiannya, maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Implementasi dapat diartikan sebagai “suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. “Secara sistematis Pressman dan Wildavsky (Dunn, 1998) memandang implementasi sebagai suatu proses interaksi antara tujuan yang ditetapkan dengan tindakan-tindakan yang dimaksudkan mewujudkan tujuan tersebut. Sementara menurut Jones (dalam Dunn, 1998) implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan secara efektif, sehingga implementasi kebijakan memuat tentang aktivitas-aktivitas program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dirasakan hasilnya atau manfaatnya oleh kelompok sasaran yang dituju.

Nakamura dan French smallwood (1980), dalam Subarsono (2003), memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menterjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Menurut Pressman Wildavsky (1984) dalam Subarsono (2003) implementasi diartikan sebagai instruksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Tujuan studi implementasi yang paling utama adalah mempelajari bagaimana kinerja suatu kebijakan publik, serta mengkaji secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan (Effendi, 2000).

Tujuan lain dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Dunn, 1998). Efektivitas implementasi kebijakan dapat dilihat melalui 2 perspektif, yang pertama dari sudut proses (implementasi, yaitu menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program atau kebijakan dengan *policy guidelines*, merupakan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan program yang dibuat oleh pembuat program, yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan pemanfaatan program. Program dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan *policy guidelines* yang telah ditentukan. Kedua: dari perspektif outcome suatu program dikatakan berhasil apabila program tersebut menghasilkan dampak seperti yang diharapkan (Effendi, 2000).



Daftar Pustaka

- Ariani, Desi dan Irma Juraida. 2019. *Eksistensi Perempuan Suku Sasak dalam Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Ekowisata Pesisir Desa Sembalun Lawang*. Jurnal Community. Volume 5, No. 2 Oktober 2019.
- Anneke Grjege Maindoka. 2004. *Implementasi Kebijakan Program Masyarakat untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Minahasa*. Jurnal PSW Vol. 1 No. 2 Oktober 2004. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2021. *Arah Kebijakan Anggaran Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Naskah Tidak Diterbitkan.
- Cornelis, et al, 2005. *Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE.
- Denhdart, Robert B. 1995. *Public Administration an Action Orientation*. Belmont: Widworth Publishing Company.
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofiyani. 2001. *Hand Out dan Materi Kuliah Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MAP-UGM. Naskah Tidak Diterbitkan.
- Ishartono dan Santoso Tri Rahardjo. 2016. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Social Work Jurnal. Volume 6 No. 2 Tahun 2016
- Koentjoroningrat. 1994. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prananta, Arie Wahyu (ed). 2019. *Masyarakat Migran Madura*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosiologi dan Pemberdayaan Masyarakat UTM dan Penerbit Elmatara.
- Prabudiantoro, B. (1997). *Kriteria Citra Waterfront City* (tesis tidak dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Salim, Agus. 2001. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Semarang: Tiara Wacana.
- Subarsono, Agustinus. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Surya, Roberta Zulphi. 2019. *Analisa Keselarasan SDGs Dengan Program Pembangunan Kawasan Pesisir Seresam di Desa Seresam Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Selodang Mayang, Vol. 5 No. 2 Agustus 2019.
- Yuwono, M. (2009). *Visi Pembangunan Waterfront City: Suatu Tinjauan Budaya*. Buletin Tata Ruang Edisi September- Oktober